

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa awal Perang Dunia I, setiap negara pastinya akan terus meningkatkan kekuatannya militer untuk dapat berperang dengan negara lain, ataupun untuk menjaga wilayahnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, peperangan mulai berakhir dan banyak negara-negara baru yang bermunculan. Dengan adanya sejarah peperangan mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, sampai dengan adanya Perang Dingin, maka banyak sekali negara yang mengumpulkan dan mengembangkan kekuatannya militer untuk mengamankan kedaulatan negaranya dari ancaman-ancaman negara lain. Banyak negara juga mulai mengembangkan sistem persenjataan mereka dengan dua tujuan, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kekuatan militer negara tersebut untuk menjaga kedaulatannya serta meningkatkan posisi negara mereka dalam dunia internasional. Kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi negara tersebut dengan menjual peralatan militer kepada negara lain atau melakukan perjanjian kerjasama militer dengan negara lain. Karena kekuatan ekonomi suatu negara tidak kalah pentingnya dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Maka dari itu sekarang banyak negara yang berlomba-lomba dalam menawarkan kecanggihan alat-alat militer mereka.

Perdagangan senjata global hanya didominasi oleh beberapa negara saja. Selama periode 2010-2014 saja hampir 74% dari total semua volume perdagangan

ini berasal dari Amerika, Rusia, China, German dan Prancis. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada pertumbuhan perdagangan senjata yang dialami oleh China dari yang awalnya menjadi negara eksportir senjata terbesar ke-9 selama periode 2005-2009 menjadi negara eksportir senjata terbesar ke-3 hanya dalam periode kurun waktu 2010-2014. Antara dua periode ini, ekspor alat-alat militer China berhasil mengalami peningkatan sebesar 143%. Untuk perbandingan saja, total dari penjualan senjata dari semua anggota Uni Eropa antara periode itu turun sebesar 16% (Wezeman & Wezeman, 2015; Freeman, Fleurant, Wezeman, & Wezeman, 2015).

Perdagangan senjata menjadi sebuah bisnis yang sangat besar dalam dunia internasional. Pada tahun 2014, pengeluaran militer global berjumlah sekitar 2.3% dari GDP global, atau sekitar US\$ 1.776 miliar. Dengan pengeluaran US\$ 610 miliar pada tahun 2014 (34% dari belanja militer global), Amerika Serikat menjadi negara yang paling boros nomor satu untuk pengeluaran militer diikuti oleh China yang berada diposisi kedua sebagai negara yang paling boros dalam pengeluaran militer (12% dari total pengeluaran global), Rusia berada diposisi ketiga (4,8%), Saudi Arabia (4.5%) dan Prancis (3,5%). Pengeluaran militer meningkat paling banyak di Amerika Tengah dan Karibia (9,1%), Eropa Timur (8,4%) dan Afrika Utara (7,6%) (Freeman, Fleurant, Wezeman, & Wezeman, 2015).

Secara keseluruhan, perdagangan senjata global semakin berkembang. Volume senjata utama yang yang dikeluarkan mencapai 16% lebih tinggi selama periode 2010-2014 dibandingkan periode 2005-2009 (SIPRI, 2016). Antara dua periode, impor senjata meningkat di semua wilayah kecuali Eropa, di mana impor

senjata menurun 36%. Impor senjata ke Afrika meningkat 45%, ke Asia dan Oceania sebesar 37%, ke Timur Tengah sebanyak 25% dan ke Amerika sebanyak 7%. Importir senjata terbesar selama 2010-2014 adalah India, Arab Saudi, China, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Semua negara ini menyumbangkan 33% dari seluruh impor senjata global (SIPRI, 2016).

Hanya ada beberapa negara besar saja yang mendominasi sebagai pengeksport senjata terbesar di dunia, tetapi ada satu negara yang menjadi incaran dari banyak negara untuk mendapatkan teknologinya, yaitu Swedia. Pada tahun 2013 sendiri, industri pertahanan Swedia mengeksport peralatan militer senilai kurang lebih 2 miliar (Jarlen & Jonsson, 2015). Menurut SIPRI Arms Transfer Database, Swedia adalah eksportir senjata terbesar ke-11 untuk periode 2010-2014 dan menyumbang 2% dari pengiriman dunia (Freeman, Fleurant, Wezeman, & Wezeman, 2015). Sekitar 78% dari ekspor Swedia pergi ke beberapa negara-negara Uni Eropa dan negara mitra tradisional seperti Kanada, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. 22% lainnya dari total nilai ekspor pergi ke beberapa negara seperti Thailand, India dan Arab Saudi, Amerika Serikat, Norwegia, dan Inggris (Freeman, Fleurant, Wezeman, & Wezeman, 2015).

Swedia sendiri bukanlah pemain baru dalam bidang ini walaupun hanya memiliki pasar yang kecil dalam perdagangan persenjataan global. Sejarah mengatakan bahwa Swedia telah lama bergelut dalam bidang militer. Swedia sendiri mengambil sebuah keputusan strategis setelah selesainya Perang Dunia II yang berdampak pada industri senjata Swedia. Pemerintah menganggap perlu untuk memiliki industri persenjataan yang besar dan maju untuk menghindari

ketergantungan pada negara lain, yang pada saat krisis dapat membahayakan status netral negara tersebut (Stenlas, 2008). Pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung perusahaan senjata Swedia dengan cara persenjataan negara diambil dari industri persenjataan dalam negeri. Pada tahun 1960'an, sebanyak 90% dari semua peralatan yang berhubungan dengan militer dikembangkan dan diproduksi di Swedia. Tetapi karena anggaran militer negara itu menurun selama bertahun-tahun, mengekspor senjata menjadi cara untuk membiayai pengembangan dan produksi senjata di Swedia. Hal ini telah menciptakan hubungan khusus antara industri senjata dan pemerintah Swedia di mana pemerintah berkontribusi untuk memfasilitasi ekspor senjata untuk menegakkan industri nasional dan untuk alasan keamanan lainnya. Pada tahun 2000 Badan Ekspor Pertahanan dan Keamanan Swedia didirikan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mempromosikan ekspor senjata Swedia ke luar negeri. Tetapi Badan Ekspor Pertahanan dan Keamanan Swedia ini akhirnya ditutup pada tahun 2015 untuk diserahkan ke *Swedish Defence Materiel Administration* (Gerome, 2016).

Saat ini mayoritas dari semua produksi persenjataan di Swedia diekspor ke luar negeri. Ekspor persenjataan hanya 1% dari keseluruhan ekspor Swedia. Pada 1990-an, banyak perusahaan produsen senjata yang dimiliki Swedia sebelumnya dijual ke perusahaan asing (Bromley & Wezeman, 2013). Namun demikian, aktor dominan di pasar adalah SAAB yang masih dimiliki oleh Swedia, memegang hampir 50% dari pangsa pasar (Bromley & Wezeman, 2013). Aktor utama lainnya adalah BAE Systems Bofors, BAE Systems Hägglunds, dan Nammo Sweden (Gerome, 2016).

Sesuai dengan keputusan yang diambil oleh parlemen pada tahun 2004, produksi senjata Swedia berfokus pada lima sektor: senjata aerospace, kendaraan lapis baja, kapabilitas jaringan-sentris, komunikasi, dan senjata jarak dekat (Ericson & Larrson, 2013). Sektor kedirgantaraan secara historis memiliki posisi yang menonjol di industri senjata Swedia dan saat ini tetap menjadi salah satu sektor yang paling penting. Antara tahun 2008 dan 2012 ekspor dalam pesawat berjumlah 51% dari total ekspor senjata Swedia. Secara proporsional, manufaktur dan pengiriman senjata-senjata kecil dan ringan jumlahnya lebih sedikit dari pada jenis senjata yang lainnya (Berman, 2011).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Swedia menjadi salah satu negara yang sangat diminati oleh banyak negara dalam kerjasama militer. Perkembangan teknologi militer Swedia menjadi incaran dari banyak negara, mulai dari Amerika, Uni Eropa, negara-negara Timur Tengah, Asia, dan kawasan Afrika. Tetapi dalam sebuah hubungan kerjasama ini, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan diplomatik antar negara akan berjalan naik turun seiring perkembangan perpolitikan yang ada dalam dunia internasional. Begitu pula hubungan Swedia dengan Arab Saudi, sebuah kerjasama yang sudah terjalin sangat lama antara Swedia dengan Arab Saudi dalam kerjasama militer ini tidak menjamin bahwa hubungan diantara kedua negara akan selalu berjalan dengan baik.

Pada tahun 2015, dunia internasional khususnya Uni Eropa dikagetkan dengan keputusan Swedia untuk tidak lagi melanjutkan perjanjian kerjasama militernya dengan Arab Saudi. padahal Arab Saudi dan Swedia sudah lama menjalin kerjasama ini yaitu mulai dari tahun 2005 (Bershidsky, 2014) dan di luar

pasar Eropa, Arab Saudi menjadi pasar ke-3 terbesar dalam perdagangan senjata Swedia (Dickson, 2015).

B. POKOK PERMASALAHAN

Mengapa Swedia memberhentikan kerjasama militer dengan Arab Saudi tahun 2015?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Teori pada dasarnya merupakan bentuk penjelasan yang paling umum dalam menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan kapan sebuah fenomena diduga akan terjadi. Dengan kata lain teori dapat digunakan sebagai dasar eksplanasi maupun dasar bagi prediksi. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan (Masoed, 1990, hal. 185).

Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*Decision Making Theory*) oleh William D. Coplin dan Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest Concept*) oleh Donald E. Nuchterlin.

1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Teori ini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan luar negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya (Coplin, 2003, hal. 30) menyatakan:

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut

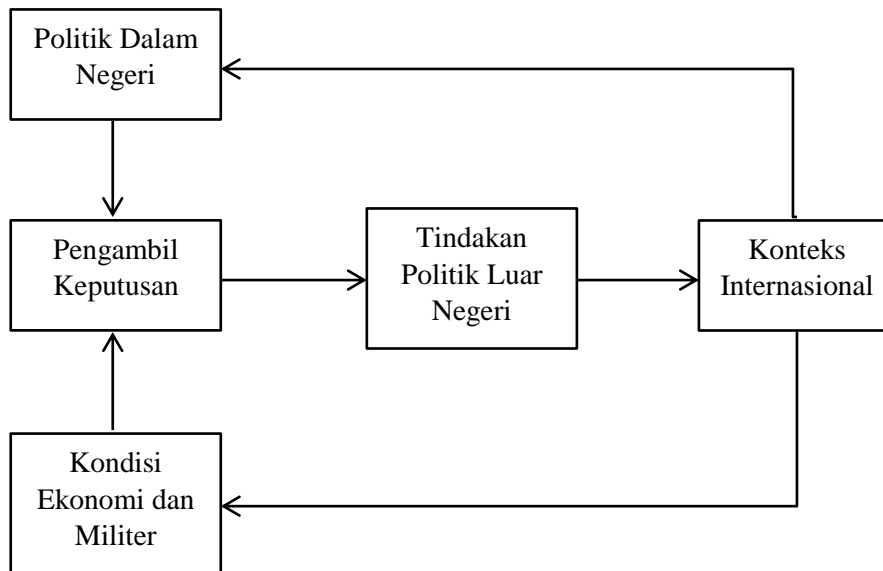
dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: pertama, kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan permasalahan yang dihadapi)”

Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri yang digunakan sebagai cara dalam berhubungan yang ini bisa dibidang sebagai perilaku sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain tentunya tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Maka dari itu sebuah negara akan mengambil kebijakan luar negeri demi kepentingan nasionalnya (Coplin, 2003; Maksum, 2015).

Agar dapat lebih memahaminya Wiliam D. Coplin menjelaskannya dalam bentuk interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri sebagai berikut:

Gambar 1.1

Proses Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri oleh William D. Coplin



Sumber: (Coplin, 2013)

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor (Coplin & Marbun, 2003), yaitu:

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Coplin mengatakan “untuk menentukan cara kerja kebijakan luar negeri, dapat diamati dari situasi domestik suatu negara”. Situasi suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri baik oleh budaya ataupun sistem politik negara tersebut. Politik domestik mencakup faktor budaya yang secara mendasar dipengaruhi oleh perilaku orang-orang dan kondisi politik domestik yang saat ini terjadi. Meskipun, negara adalah aktor, manusia adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan seperti aksi dan reaksi. Orang tidak seperti negara. Mereka memutuskan dan memainkan konsep kepentingan nasional,

mengatur strategi, dan membuat keputusan atau bahkan mengevaluasi keputusan yang sudah dijalankan. Dalam kasus beberapa negara, pemimpin suatu negara (Presiden, Perdana Menteri, atau Raja) memainkan bagian yang dominan dalam proses pengambilan keputusan (Coplin, 2003, hal. 74).

Sesuai dengan William D. Coplin, situasi politik internal dalam sebuah negara memberikan pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Pembuat keputusan membutuhkan dukungan dari *policy influencer* sebagai dukungan untuk memperkuat kebijakan.

Ada 4 tipe *policy influencer* menurut William D. Coplin:

- 1) Birokrat, 2) Partisipan, 3) Kelompok Kepentingan, 4) Media Massa

Pertama adalah birokrat, mengacu pada individu dan organisasi di badan eksekutif yang berfungsi untuk mendukung pengambil keputusan untuk mengatur kebijakan. Oleh karena itu, kelompok birokrasi memiliki posisi penting dalam pembuatan kebijakan. Itu terjadi karena mereka membantu pengambil keputusan dan memberikan informasi yang terkait dengan kebijakan dan birokrasi juga menjamin kebijakan akan digunakan ke dalam masyarakat.

Kedua adalah partisipan. Influencer ini diambil dari tuntutan-tuntutan masyarakat yang diangkat sampai ke pemerintahan untuk dijadikan sebuah kebijakan oleh pemerintah.

Ketiga adalah kelompok kepentingan. Kelompok ini merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama atau suatu organisasi yang memiliki kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Adanya organisasi ataupun kelompok kepentingan ini sangat diperlukan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan khususnya dalam dukungan finansial

Keempat adalah media massa. Media massa ini juga mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah. Media massa dapat menggunakan kekuatannya dalam mempublikasikan ataupun menyebarkan suatu opini ataupun isu.

Dalam kasus ini, Perdana Menteri Swedia Stefan Loefvan sebagai pengambil keputusan mendapatkan desakan dari dua partai koalisi yang berkuasa di Swedia yaitu Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau untuk segera menghentikan kerja sama militer dengan Arab Saudi (Galih, 2015).

2. Kapasitas ekonomi dan militer

Menurut Coplin, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat ditentukan sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Sebagaimana tercantum dalam buku "*Introduction of International Relation*" oleh William. D. Coplin bahwa kita harus menyadari bahwa kemampuan ekonomi negara memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri mereka karena kemampuan ekonomi berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Penilaian kapasitas ekonomi suatu negara harus mencakup

analisis kesejahteraan negara dan bagaimana tingkat kekayaan dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dan pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya, ketika kita membahas kapasitas ekonomi suatu negara, sebenarnya kita memperhatikan tidak hanya kapasitas produksi tetapi juga kapasitasnya bila dibandingkan dengan negara lain, serta kemampuan negara untuk memenuhi tuntutan ekonomi rakyatnya secara kuantitatif atau kekayaan per kapita dan kualitatif atau jenis produk.

Swedia sendiri merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Bisa kita lihat ekspansi berbagai perusahaan Swedia di berbagai dunia seperti IKEA dan H&M. Ke dua perusahaan ini sendiri bisa dibidang sudah menguasai pasar dunia seperti IKEA yang fokus dibidang furniture dan juga H&M yang fokus di bidang fashion. Tidak lupa perusahaan-perusahaan di industri militer sendiri menurut data SIPRI (2016) setiap tahunnya selalu berekspansi dan melakukan kerjasama-kerjasama baru dengan negara-negara lain dan juga pendapatan Swedia dalam industri ini selalu meningkat setiap tahunnya (Freeman, Fleurant, Wezeman, & Wezeman, 2015). Maka jika dibandingkan dengan hilangnya satu kerjasama saja dengan Saudi Arabia hal ini tidak akan merugikan pemasukan Swedia ataupun perusahaan industri senjata Swedia dalam industri perdagangan senjata. Anna Ekberg, juru bicara kementerian luar negeri Swedia juga mengatakan bahwa Swedia tidak mengalami efek ekonomi apapun karena pemutusan kerjasama militer dengan Arab Saudi (Chase, 2016).

3. Konteks Internasional

Dalam menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain kita dapat menggunakan konteks internasional. Hal ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara. Hans J. Morgenthau (2003, h.166) mengatakan bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat membagi untuk melihat mana teman dan mana musuh.

Menurut Coplin (2003, h.167) ada tiga elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Ketiga elemen dasar tersebut adalah geografis, ekonomis dan politis.

Dalam kasus ini, Swedia memiliki kekhawatiran terhadap adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Arab Saudi menyusul seorang Blogger Raef Baedawi yang dihukum 1.000 cambukan dan 10 tahun penjara oleh pemerintah Arab Saudi karena dituduh telah menghina Islam serta adanya pemblokiran pidato menteri luar negeri Swedia dalam pertemuan Liga Arab oleh Arab Saudi. (Patnistik, 2015).

2. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, definisi kepentingan nasional adalah:

“Tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu Negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling penting

kebutuhannya secara umum. Termasuk didalamnya hak untuk mempertahankan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan serta kesejahteraan ekonomi” (Plano, Jack C. Dan Roy Olton, 1980, hal. 10).

Kepentingan nasional merupakan tujuan nasional yang dijadikan dasar para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negerinya. Setidaknya, ada lima kebutuhan vital yang dapat menyebabkan sebuah negara dalam mengambil kebijakan politik luar negerinya yaitu:

- (1) *self preservation*, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memelihara keberadaan, identitas, serta nilai-nilai yang dimiliki agar ia terbebas dari pengaruh yang timbul atas keberadaan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh negara lain;
- (2) *independence*, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memiliki negara yang sepenuhnya berdaulat, serta pemerintahan yang dalam menjalankannya ia tidak takluk dan tunduk kepada negara lain;
- (3) *territorial integrity*, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memelihara keutuhan wilayah nasionalnya;
- (4) *military security*, yakni kebutuhan untuk memelihara kekuatan militernya dan menjaga agar tidak ada kekuatan militer lain yang dapat mengancam keamanannya;
- (5) *economic well-being*, yaitu kebutuhan untuk dapat meningkatkan kemampuan, pendapatan, dan kesejahteraan dibidang ekonomi bagi negara dan rakyatnya.

Dengan menggunakan konsep di atas sebagai kerangka berfikir, dapat kita peroleh bahwa faktor *self preservation, independence, territorial integrity, military security*, serta *economic well-being* masing-masing memiliki andil yang besar dalam perilaku sebuah negara terhadap lingkungan eksternalnya. Pembuat kebijakan akan mengambil sebuah sikap atau tindakan yang diperlukan terhadap lingkungan eksternalnya untuk memenuhi salah satu, sebagian, atau bahkan kelima kebutuhan vital tersebut (Plano, Jack C. Dan Roy Olton, 1980).

Dalam konteks pemutusan hubungan kerjasama militer Swedia terhadap Arab Saudi terdapat satu point dalam konsep kepentingan nasional yang menjadi faktor pendorong pengambilan kebijakan luar negeri Swedia terhadap Arab Saudi tersebut, kepentingan itu adalah menyangkut *self preservation*.

Dalam hal *self preservation*, Swedia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang pada tahun 2014 juga telah mengeluarkan kebijakan luar negeri feminis berkepentingan untuk melindungi identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh negaranya dari Arab Saudi. Swedia menganggap bahwa adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Arab Saudi yang menimpa blogger Raef Baidawi yang dikenakan hukuman 1.000 cambukan dan 10 tahun penjara dapat mengancam nilai-nilai yang dianut oleh Swedia serta usaha Swedia dalam proses menegakkan Hak Asasi Manusia (Patnistik, 2015).

D. HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis menarik hipotesis bahwa alasan Swedia menghentikan kerjasama dengan Arab Saudi karena:

1. Hukuman cambuk yang dijatuhkan Arab Saudi terhadap Blogger Raef Baidawi dianggap dapat mengancam kepentingan nasional Swedia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.
2. Adanya desakan dari dua partai koalisi yang berkuasa yaitu partai Demokrat Sosial dan Partai Hijau setelah pidato Menteri Luar Negeri Swedia diblokir oleh Arab Saudi pada pertemuan Liga Arab.

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang diinginkan melalui skripsi ini, antara lain adalah:

1. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengetahui alasan yang mendorong Swedia dalam mengambil keputusan untuk menghentikan kerjasama militer dengan Arab Saudi.
3. Mengetahui Kepentingan Nasional Swedia dibalik penghentian kerjasama militer dengan Arab Saudi.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dan juga untuk menambah bahan bacaan bagi mereka

yang berminat tentang kajian kerjasama militer antara Swedia dan Arab Saudi.

F. METODE PENELITIAN

Dalam rangka menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran dari karya ilmiah ini, maka dibutuhkan metode dalam penelitian yang menyangkut faktor-faktor keputusan Swedia untuk menghentikan kerjasama militer dengan Arab Saudi. Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih agar kiranya tulisan ilmiah ini benar-benar bermakna. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka memaksimalkan keilmiahannya tulisan ini, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, dan teknik pengumpulan data.

- Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang berusaha untuk menyelidiki, memahami, dan kemudian menjelaskan atau menganalisa suatu gejala yang diteliti dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Penjelasan atas gejala yang diteliti tersebut tentu dilakukan melalui penyusunan hasil penelitian secara sistematis. Proses penyusunan ini memiliki substansi analitis dan interpretatif dalam setiap penjelasannya. Penelitian ini menggunakan data sebagai bukti dalam menguji kebenaran dan ketidakbenaran hipotesis. Data yang muncul berwujud kata-kata, dan bukan rangkaian angka (Narbuko & Achmadi, 2012).

- **Sifat penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimana penulis berusaha untuk mendapat uraian yang menggambarkan suatu kolektifitas dengan syarat bahwa representasi harus terjamin. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan melukiskan reaksi social yang kompleks dan sedemikian rupa sehingga relevansinya tercapai. Penelitian ini akan memanfaatkan dan menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi mengklasifikasikan gejala-gejala sosial yang dipersoalkan (Nawawi, 1987).

- **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber berupa buku- buku, jurnal ilmiah, artikel internet, dan referensi-referensi ilmiah lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Data yang diperoleh dari sumber-sumber buku ini, menjadi bagian inti yang berfungsi sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Demi menjaga efektifitas sebuah karya tulis, maka penulis membatasi jangkauan penelitian agar tidak terlalu luas pembahasannya. Jangkauan penelitian pada karya tulis ini memfokuskan mulai dari tahun 2014 yang merupakan awal dari kebijakan luar negeri feminis Swedia yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri Margot Wallstrom sampai pada tahun 2015 dimana Swedia memutuskan untuk menghentikan kerjasama militer dengan Arab Saudi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab, yang kemudian tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi: latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan dan teknik penulisan.

BAB II : POLITIK LUAR NEGERI SWEDIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang politik luar negeri Swedia

BAB III : GAMBARAN UMUM HUBUNGAN SWEDIA – ARAB SAUDI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah dan juga dinamika hubungan luar negeri Swedia – Arab Saudi

BAB IV : PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWEDIA TERHADAP ARAB SAUDI TAHUN 2015

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Swediaa terhadap Arab Saudi tahun 2015

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan akhir dari penulisan skripsi.

